

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

- Abdullah, Rozalli. 1994. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Asmuni. 2017. *Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara: Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara*. Malang. Setara Press.
- Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Ristekdikti. 2016. *Persyaratan dan Prosedur Penyesuaian Perubahan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta*. Jakarta.
- Djais, Mochammad. 2000. *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2012. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Gautama, Sudargo. 1955. *Pengertian Negara Hukum*. Bandung. Alumni.
- Gunawan, Johannes. 2016. *Paper Presentasi: Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Jakarta. Kemenristek Dikti.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta. Kanisius.
- HR, Ridwan. 2010. *Hukum Administrasi Negara Ed. Revisi*. Yogyakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Banyumedia Publishing.
- Illahi, Rozaksan Rinota. 2017. Skripsi. *Aspek Formalitas Pembuatan Keputusan sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor: 193/G/Lh/2015/PTUN-JKT)*. Purwokerto. Universitas Jenderal Soedirman.

- Khaleed, Badriyah. 2016. *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Lubna. April 2015. *Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat*. Jurnal Sasi Vol. III No. 7.
- Marbun, SF dan MD, Mahfud. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Kencana.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soejono Soekanto. 1993. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjandra, W. Riawan. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya.
- Triwulan, Titik dan Isnu Widodo Gunadi. 2014. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta. Kencana.
- Wantu, Fence M. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Gorontalo. Reviva Cendekia.
- Wiyono, R. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

**Putusan Pengadilan:**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 6/G/2015/PTUN.TPI.